

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Notaris, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Serta Larangan Bagi Notaris	32

1. Pengertian Notaris	32
2. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris	34
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	41
B. Tinjauan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.....	47
C. Jenis Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana	52
D. Implikasi Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris	54
E. Tinjauan Tentang Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris.....	63
1. Pengertian Majelis Notaris	63
2. Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris	63
F. Pengertian Polri dan Tugas Pokok Polri	69
G. Pengertian Penyidikan dan Proses Penyidikan	71
H. Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.....	73
1. Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.....	73
2. Proses Penyidikan Terhadap Notaris Sebagai Pelaku Tindak Pidana	80
I. Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris Oleh	

	Penyidik Polri.....	81
	1. Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	81
	2. Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	85
	3. Proses Pemanggilan dan Pemeriksaan Setelah Keluarnya Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.....	85
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perbedaan Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Oleh Notaris Pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.....	88
	B. Dampak Perbedaan Pola Pikir Penyidikan Oleh Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Untuk Notaris Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya.....	100
	C. Model Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Akta Yang Dibuatnya Pasca Putusan MK Nomor	

	49/PUU-X/2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016.....	106
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Simpulan	110
	B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	115

